



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Wilayah & Tata Ruang

Senin, 4 September 2017



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2017**

Daftar Isi

1. KAMPANYEKAN RELOKASI IBU KOTA NEGARA (*Media Online Media Indonesia*)
2. MENDES : 2019 TIDAK ADA LAGI DESA TERTINGGAL (*Media Online Suara Pembaruan*)

KAMPANYEKAN RELOKASI IBU KOTA NEGARA



Harian Umum
Media Indonesia 

@Midotcom 



Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com

Senin, 4 September 2017

Kampanyekan Relokasi Ibu Kota Negara

PEMINDAHAN ibu kota negara bakal memiliki dampak positif mengurangi kesenjangan nasional dan mengentaskan lebih banyak masyarakat dari kemiskinan. Hal itu semestinya yang digaungkan sebagai salah satu tujuan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta.

"Perlu ada dorongan untuk mengampanyekan perlunya pemindahan ibu kota ini dengan segera," ujar pakar pembangunan wilayah dari Fakultas Geografi UGM Rijanta dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan, kemarin.

Rijanta berpendapat, pemindahan ibu kota negara bu-

kan hanya didasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut. Pemindahan ibu kota negara tidak akan menjadi solusi atas persoalan itu.

Pakar pembangunan wilayah UGM Lutfi Mutaali menambahkan, daerah yang dipilih menjadi ibu kota negara nantinya sebaiknya merupakan daerah atau kota yang memiliki keterbukaan wilayah yang tinggi. Wilayah-wilayah yang berada di alur pantai kepulauan Indonesia cocok untuk itu.

"Terutama di jalur laut. Kalau Palangkaraya, inklusivitas wilayahnya cenderung tertutup," ujarnya dalam seminar

bertajuk Ke Mana Ibu Kota Negara Indonesia akan Dipindah, di Yogyakarta, pekan lalu.

Selain inklusivitas fisik yang tinggi, Lutfi mengatakan kota yang akan dipilih sebaiknya mempunyai inklusivitas sosial tinggi. Inklusivitas sosial tinggi ditandai dengan keterbukaan terhadap perubahan yang terlihat pada masyarakat homogen.

Dari kedua kriteria tersebut, Lutfi merekomendasikan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten tersebut dinilai memiliki keterbukaan fisik dan sosial yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di

Pulau Kalimantan.

Sementara itu, pakar geomorfologi UGM Junun Sartohadi menyarankan pemilihan ibu kota baru hendaknya juga harus memperhatikan risiko bencana di masa depan. Lagi-lagi Pulau Kalimantan dipandang tepat untuk dipilih karena relatif aman dari bencana geofisik, seperti gempa dan letusan gunung berapi.

Namun, dikatakan Junun, terdapat beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut rentan terhadap bencana kebakaran. (AT/P-1)

Pemindahan ibu kota Negara bakal memiliki dampak positif mengurangi kesenjangan nasional dan mengentaskan lebih banyak masyarakat dari kemiskinan. Hal itu semestinya yang digaungkan sebagai salah satu tujuan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Perlu ada dorongan untuk mengampanyekan perlunya pemindahan ibu kota ini dengan segera

Hashtag Berita :

#SmartCity #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #IbuKotaNegara
#KotaPemerintahan #PemerataanEkonomi

SUARA PEMBARUAN

Senin

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

4 September 2017

Mendes: 2019 Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal

[JAKARTA] Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo optimis di 2019 mendatang tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia. Dari survei internal yang dilakukan Kemdes PDTT bekerja sama dengan sejumlah universitas menunjukkan sebagian besar target RPJM nasional mengenai jumlah desa tertinggal yang diartikan telah tercapai.

Hal tersebut disampaikan Mendes di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (3/9). Menurut Mendes, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, pemerintah menargetkan mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Desa mandiri artinya memiliki kekuatan ekonomi untuk bisa menopang hidupnya, sehingga tidak ada lagi kemiskinan.

"Kami masih menunggu hasil survei Badan Pusat Statistik tentang potensi desa di bulan September ini. Kita akan segera tahu berapa desa masih tertinggal. Tapi dari survei internal kami,



Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meninjau embung yang mengairi sawah seluas 50 hektare dari dua desa sekaligus, yakni Desa Muruy dan Desa Karyasari. Semua usaha kelompok tani ini menggunakan dana desa.

jumlah yang ditargetkan sudah tercapai," kata Mendes.

Mendes mengatakan, dengan dana desa, jumlah desa tertinggal yang terentaskan cepat tercapai. Ia memcontohkan di Pandeglang, sebelumnya ada sekitar 140 desa tertinggal. Setelah masuknya dana desa, sekarang hanya tersisa 74 desa tertinggal. Jika program dana desa tetap dijalankan dan semua desa mengelolanya dengan

baik dan tepat, maka besar peluang tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia.

Mendes mengatakan, di 2018 nanti rasio pembagian dana desa akan diperbesar untuk desa tertinggal. Dana desa yang besarnya masih tetap sama dengan tahun ini, yakni Rp 60 triliun, sebesar 80% dibagikan kepada seluruh atau 74.910 desa di Indonesia, sedangkan 20% sisanya ditambahkan

kepada desa-desa yang masuk kategori tertinggal.

Lanjut Mendes, untuk program kerja seluruh desa di 2018 nanti masih tetap sama, yakni melaksanakan empat program prioritas pemerintah, seperti menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (prukados), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga

desa. Sementara untuk desa-desa tertinggal diberlakukan afirmasi kebijakan sesuai kondisi masing-masing desa.

Mendes juga mengatakan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap kemajuan desa dengan menaikkan dana desa setiap tahunnya. Namun, untuk 2018 rencana kenaikan dana desa dua kali lipat dari Rp 60 triliun (2017) menjadi Rp120 triliun ditunda karena masih dievaluasi. Karena itu, Eko meminta seluruh kepala desa se-Kabupaten Pandeglang untuk membuktikan bahwa dana desa membawa manfaat besar, dan dikelola sesuai aturan.

"Karena belakangan ini kelihatannya dana desa gaduh, Presiden juga jadinya tahun lalu (kemakan dana desa-ec). Makanya saya minta seluruh desa, khususnya di Pandeglang harus buktikan bisa mengelola dana desa seperti desa sukses lainnya, buktikan dan sarankan bahwa desa bermasalah sedikit saja dibandingkan yang sukses," kata Eko.

Meski batal naik, menurut Mendes, dana yang diperoleh tiap desa sangat besar. Tiap desa mendapatkan lebih dari Rp 1,2 miliar tiap tahunnya, terdiri dari dana

desa Rp 800 juta dari pemerintah pusat, ditambah alokasi dana desa dari kabupaten sekitar Rp 400 jutaan.

Kelola Dana

Menurut Eko, pengelolaan dana desa belakangan ini memang bermasalah. Namun, kata dia, persentase desa yang bermasalah jauh lebih kecil dibanding desa yang sukses. Contohnya desa-desa Pandeglang membuktikan bahwa desa mampu dan sukses mengelola dana desa.

Dalam waktu 100 hari petani di satu desa saja bisa memanen jagung seluas lebih dari 50 hektare di bekas lahan pohon kelapa. Keuntungan yang diperoleh lebih besar dibanding menanam kelapa dengan masa panen sangat lama. Hampir semua desa di Pandeglang telah memiliki BUMDes dan sebanyak 326 desa telah mengalokasikan APBDDes-nya untuk membangun embung.

"Kalau semua desa bisa seperti ini, maka pasti terjadi peningkatan dan percepatan pertumbuhan di desa-desa. Sudah pasti desa menjadi maju dan mandiri, tidak ada lagi kemiskinan di desa," kata Eko. [D-13]

Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo optimis di 2019 mendatang tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia. Dari survei internal yang dilakukan Kemdes PDTT bekerja sama dengan sejumlah universitas menunjukkan sebagian besar target RPJM nasional mengenai jumlah desa tertinggal yang diartikan telah tercapai

Hashtag Berita :

#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #PelaksanaanProgramNasional
 #RPJMN #DanaDesa #KementerianDesaPembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi
 #Infrastruktur